



TRIBUNJOGJA/IKRAR GILANG

TERIMA PENGHARGAAN - Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menerima penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI atas peringkat Kota Yogyakarta Center of Excellence (CoE) dalam proses pengadaan barang dan jasa se-Indonesia.

Pengawasan Sulit Dilakukan

PROSES pengadaan barang dan jasa seringkali rawan penyelewengan dan berujung pada kasus hukum yang menjerat PNS. Transparansi dan integritas kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Yogyakarta rupanya cukup diakui di tingkat nasional. Divisi Pengaduan Dan Investigasi Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota

Yogyakarta Baharudin Kamba menyebut ada beberapa kerawanan penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa, semisal saat proses jelang berlangsung, kerawanan tersebut mengacu pada tawaran-tawaran nilai atau besaran sebelum transaksi.

● ke halaman 14

Pengawasan Sulit Dilakukan

● Sambungan Hal 13

"Yang rawan itu biasanya saat tawaran berlangsung, biasanya dalam temuan ternyata harga atau barang tidak sesuai aslinya," ujar Kamba pada Rabu (26/7).

Kamba menyebut, proses pengawasan susah dilakukan pasalnya penyelewengan baru bisa diketahui ketika ada temuan dari BPK. Informasi-informasi juga didapat, biasanya dari pihak yang kalah atau tidak mendapat pro-

yek lelang.

"Pemerintah Kota Yogyakarta harus belajar dari kasus korupsi pengadaan Pergola beberapa waktu lalu, sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa," ungkapnya.

Ia menyebut, pelayanan ULP saat ini sudah cukup bagus, terlebih dengan adanya e-katalog. Daftar barang beserta harga standar tersebut menunjukkan transparansi dan akuntabilitas proses pelelangan.

Nilai baik

Proses pelayanan ULP Kota Yogyakarta rupanya mendapat nilai baik di tingkat nasional. Kota Yogya-

karta masuk dalam delapan daerah dengan peringkat Center of Excellence (CoE) dalam proses pengadaan barang dan jasa se-Indonesia.

Penilaian tersebut dilakukan oleh Millennium Challenge Account - Indonesia (MCA-I) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Kota Yogyakarta berhasil mengembangkan program modernisasi pengadaan sejak tahun 2014.

Project Director Program Modernisasi Pengadaan dari MCA-I Firman Darmawan menjelaskan, program mo-

demisasi pengadaan bertujuan untuk mencapai penghematan biaya dan efisiensi pengadaan barang dan jasa dengan tetap memastikan kualitas yang memenuhi kebutuhan publik. Selain itu, program memastikan pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai dengan perencanaan.

"Proses pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta ini sudah baik dan meningkat pesat padahal baru mengikuti program tahun 2014, sehingga menjadi daerah percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia," tutur Firman. (gjl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Inspektorat 3. Forpi 4. Bagian Layanan Pengadaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005